

**EVALUASI PROGRAM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN
(PELATARAN) TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DI
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ANDI BAU REZKIA NURZAFARDIKA LOLOGAU

NIT. 22313955

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

This study evaluates the implementation of the Weekend Land Service Program (Pelataran) and measures community satisfaction with the service at the Makassar City Land Office. Land services are linked to legal certainty over land rights, yet limited operating hours on working days often restrict access, particularly for people with rigid work schedules. Pelataran was introduced to widen access by offering selected land services on Saturdays and Sundays. This study used a sequential mixed-methods design, combining quantitative data from a Community Satisfaction Survey (IKM) of 63 respondents with qualitative data from interviews and observation involving land office staff. Quantitative data were analyzed descriptively using the weighted-average procedure in Ministerial Regulation PERMENPAN RB No. 14 of 2017, while qualitative data were analyzed using the Miles and Huberman model. Results show that Pelataran has operated in accordance with its objectives, achieving an overall satisfaction score of 83.42, categorized as "Good." The requirements dimension received the lowest score, while service-product quality and complaint handling received the highest. Remaining constraints include limited weekend staffing, short operating hours, system disruptions, and uneven public understanding of requirements. The study recommends additional staffing during peak periods, strengthened outreach, and continuous improvement of the digital service system.

Keywords: weekend land service; community satisfaction index; public service evaluation; land office

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRACT.....	xvi
INTISARI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang	18
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Kajian Terdahulu	23
B. Kerangka Teoritis	28
C. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Format Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39

C. Waktu Penelitian	40
D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampling	41
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM	50
A. Wilayah Penelitian	50
B. Kantor Pertanahan Kota Makassar	54
C. Layanan Pelataran	58
D. Proses/Alur Pelataran	59
E. Kebaruan/ Nilai tambah	60
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Pelaksanaan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan di Kantor Pertanahan Kota Makassar	62
B. Hasil Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) Terhadap Pelataran	70
C. Kendala dan Rekomendasi Perbaikan Pegawai Kantor Pertanahan Terhadap Pelataran	96
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun pelayanan administratif (Riani, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik. Namun, dalam praktiknya, pelayanan publik masih menghadapi berbagai tantangan, meliputi sulitnya akses terhadap layanan, prosedur perizinan yang rumit, ketidakpastian biaya, serta munculnya praktik pungutan liar (pungli), yang secara keseluruhan mencerminkan masih rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Pelayanan pertanahan merupakan bagian dari pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah, seperti pendaftaran tanah, pemeliharaan data pertanahan, serta layanan administrasi lainnya. Kualitas pelayanan pertanahan menjadi sangat penting karena pelayanan yang baik akan mendukung terciptanya kepercayaan masyarakat kepada instansi pertanahan. Pelayanan pertanahan yang berkualitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan di kantor pertanahan (Aslamiah dkk., 2025).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan inovasi pelayanan yaitu Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) sebagai upaya memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat di luar hari kerja. Pemohon yang datang pada program Pelataran adalah permohonan secara langsung tanpa melalui perantara atau kuasa. Program ini secara resmi diperkenalkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2022 dan diharapkan dapat menjadi solusi

bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja (Budi Arif Muslikan, 2023).

Pelaksanaan Pelataran memiliki landasan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 12/SE/XI/2014 tentang Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran), yang menjadi penyelenggara layanan akhir pekan pada kantor pertanahan. Surat edaran ini menegaskan arah pelayanan pertanahan yang lebih cepat menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Menurut Nuraini dan Habiburahman (2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dalam Program Pelataran berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat, sehingga penyelenggara Pelataran perlu dijalankan secara konsisten dan sesuai standar pelayanan publik yang berlaku. Layanan ini mengikuti ketentuan biaya layanan pertanahan yang termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga biaya layanan Pelataran tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dan dibayarkan sesuai tarif resmi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program Pelataran masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengaturan waktu pelayanan, dan aspek teknis pelayanan. Namun, kondisi tersebut dapat berbeda pada setiap kantor pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pelataran di Kantor Pertanahan Kota Makassar, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, serta aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan (Nurdiana, 2025). Evaluasi diperlukan untuk menilai ketercapaian tujuan Program Pelataran serta mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. (Aslamiah dkk., 2025).

Pelaksanaan Pelataran sebagai pelayanan pertanahan tentu memerlukan penilaian terhadap efektivitas dan kualitas pelayanannya, termasuk menilai apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya

pelayanan akhir pekan. Untuk menilai kualitas Pelataran dapat dilakukan melalui evaluasi dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pelataran juga diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Makassar karena tingginya permohonan pelayanan pertanahan pada hari kerja menyebabkan masyarakat membutuhkan alternatif layanan yang lebih fleksibel. Adapun data penduduk yang aktif bekerja berumur 15 tahun ke atas yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Makassar yaitu sejumlah 622.389 dari total angkatan kerja 688.454, sehingga jika dipersentasekan maka angka pekerja di Kota Makassar yaitu 90,29%. Hal ini sejalan dengan target pemohon dari pelayanan pelataran yang bekerja ketika hari kerja, dimana target Pelataran yaitu untuk memudahkan para pemohon yang hanya memiliki waktu luang di akhir pekan.

Pelaksanaan Pelataran di Kantor Pertanahan Kota Makassar perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan data pelayanan Pelataran yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Makassar selama periode penelitian, rata-rata jumlah pemohon layanan Pelataran sekitar 5 sampai 6 orang per hari. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan Pelataran masih relatif rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan Pelataran serta kebutuhan perbaikan program agar layanan ini semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi pemohon yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.

Jumlah pemohon yang relatif rendah belum dapat dijadikan dasar untuk menilai kualitas pelayanan Pelataran. Kualitas pelayanan perlu diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sedangkan tingkat pemanfaatan program perlu dikaji melalui aspek lain, seperti sosialisasi, kesesuaian jenis layanan, waktu pelayanan, ketersediaan petugas, serta dukungan sistem pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan Program Pelataran, tingkat kepuasan masyarakat, serta aspek yang dapat dioptimalkan agar program menjangkau lebih banyak masyarakat.

Meskipun Program Pelataran di Kantor Pertanahan Kota Makassar telah diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan pertanahan pada akhir pekan, pelaksanaan program tersebut tetap perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana pelayanan telah berjalan sesuai tujuan serta bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, pelaksanaan pelayanan akhir pekan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelayanan pada hari kerja, seperti keterbatasan waktu pelayanan, jumlah petugas, dan jenis layanan yang tersedia, sehingga perlu dievaluasi apakah kondisi tersebut memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima Masyarakat.

Selain itu, evaluasi terhadap pengaturan sumber daya manusia, kesiapan pemohon, dan kelancaran sistem pelayanan tetap diperlukan. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pelataran dapat dipertahankan dan dioptimalkan secara berkelanjutan, seiring dengan upaya meningkatkan pemanfaatan layanan oleh masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Program Pelataran telah tersedia sebagai alternatif pelayanan pada akhir pekan, tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat atau dipengaruhi oleh faktor lain di luar kualitas pelayanan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul "EVALUASI PROGRAM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN (PELATARAN) TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pelataran di Kantor Pertanahan Kota Makassar?
2. Bagaimana Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan terhadap Program Pelataran di Kantor Pertanahan Kota Makassar?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelataran dan bagaimana rekomendasi perbaikannya di Kantor Pertanahan Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) di Kantor Pertanahan Kota Makassar.
2. Mengetahui tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang diberikan melalui Program Pelataran.
3. Mengidentifikasi kendala dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Program Pelataran di Kantor Pertanahan Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian ilmu administrasi publik dan pertanahan, khususnya terkait evaluasi inovasi pelayanan publik melalui Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran).
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelataran melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sehingga dapat menjadi dasar penilaian kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
3. Penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan kinerja program Pelataran serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan sebagai masukan bagi Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Pelataran di Kantor Pertanahan Kota Makassar telah berjalan dengan baik sebagai salah satu inovasi pelayanan pertanahan yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Pelaksanaan program didukung oleh pengaturan petugas yang dilakukan melalui pembagian jadwal dan tugas sesuai fungsi masing-masing sehingga pelayanan tetap dapat berlangsung secara tertib pada akhir pekan. Layanan yang diberikan dalam Program Pelataran meliputi Informasi Layanan Pertanahan, Pengambilan Produk, Pengecekan Sertipikat, dan Penerimaan Berkas. Keempat layanan tersebut telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Program Pelataran, yaitu memberikan alternatif pelayanan pertanahan pada hari Sabtu dan Minggu sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan tanpa harus meninggalkan aktivitas pada hari kerja.
2. Diperoleh hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, hasil Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 83,42 dan termasuk dalam kategori Baik. yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian tersebut mencerminkan bahwa unsur-unsur pelayanan, seperti persyaratan, prosedur, biaya, kompetensi petugas, perilaku petugas, produk layanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan.
3. Pelaksanaan Program Pelataran di Kantor Pertanahan Kota Makassar masih menghadapi beberapa kendala, yaitu keterbatasan jumlah petugas pada pelayanan akhir pekan, keterbatasan waktu pelayanan, kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai persyaratan dan jenis layanan Pelataran, serta masih terbatasnya sosialisasi mengenai jadwal dan mekanisme pelayanan. Kendala tersebut menjadi aspek yang masih perlu diperbaiki agar pelaksanaan Program Pelataran semakin optimal.

B. Saran

1. Kantor pertanahan Kota Makassar diharapkan dapat mempertahankan kualitas pelaksanaan Program Pelataran yang telah berjalan dengan baik serta terus melakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan tetap konsisten, efektif, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
2. Dari hasil TKM yang diperoleh maka, Kantor Pertanahan Kota Makassar diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan Program Pelataran agar tingkat kepuasan masyarakat tetap berada pada kategori Baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan yang responsif, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai.
3. Untuk meningkatkan pemanfaatan Program Pelataran oleh masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Makassar disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai jadwal, jenis layanan, persyaratan, dan mekanisme pelayanan melalui berbagai media informasi, baik media sosial, banner, maupun media komunikasi lainnya. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan akhir pekan perlu dilakukan secara berkala agar pelaksanaan Program Pelataran semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1–9.
- Aslamiah, S., Fahmi, Y., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2025). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Jurnal Pelayanan Publik, 2(2), 688–699.
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). *Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 26320–26332.
- Budi Arif Muslikan. (2023). *Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Layanan Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran)*. Jurnal Law, Development & Justice Review, 6(1), 65–80.
- Dunn, W. N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Hayuningtyas, H. Y., Marsofiyati, & Monoarfa, T. A. (2023). *Analisis Pelaksanaan Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 21(1), 31-39.
- Napitupulu, D. D. (2015). *Evaluasi Pelayanan Pertanahan pada Hari Sabtu dan Minggu di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat* (Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta). <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/937>
- Nuraini, & Habiburahman. (2023). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung*. Jurnal Manajemen Visionist, 13(1), 1-96.
- Nurdiana, I. (2025). *Implementasi Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran) Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung).
- Pane, I., Hadju, V. A., Maghfuroh, L., Akbar, H., Simamora, R. S., Lestari, Z. W., Galih, A. P., Wijayanto, P. W., Waluyo, Uslan, & Aulia, U. (2021). *Desain penelitian mixed method*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI.
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*. Journal of Management, Accounting and Administration, 1(2), 77–84.
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, & Setiawan, A. A. (2024). *Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang*. Jurnal Abdimas Prakasa Dakara, 4(2), 135–142.

<https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>.

- Riani, N. K. (2021). *Strategi Peningkatan Pelayanan Publik*. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(11), 2443–2452.
- Santi, & Murjani. (2025). *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser*. Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis, 8(1), 495–507. <https://doi.org/10.35722/japb.v8i1.1187>.
- Septianingrum, I. T., & Raharjo, T. H. (2025). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang*. Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 17(3), 999–1015.
- Al-Parihah, P. H., & Undang, G. (2023). *Evaluasi Pelayanan Publik dalam Upaya Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Soreang*. Jurnal Perceka, 01(1), 34–38.
- Subhaktiyasa, P. G., Candrawati, S. A. K., Sumaryani, N. P., Sunita, N. W., & Syakur, A. (2025). *Penerapan Statistik Deskriptif: Perspektif Kuantitatif dan Kualitatif*. Jurnal Edukasi Matematika dan Sains, 14(1), 96–104.
- Sudiro, A. A., Putra, A. P., Studi, P., Ilmu, M., Pascasarjana, P., Al, U., Indonesia, A., Al-azhar, K. M. A., Baru, K., & Selatan, J. (2020). *Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Hak Kepemilikan Atas Tanah yang Telah Didaftarkan*. Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, 5(1), 36–46.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier*. Edu Research: Jurnal Penelitian Pendidikan, 5(3), 110–116.
- Suriani, N., Risnita, & M.Syahrani, J. (2023). *Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau dari Penelitian Ilmiah Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 24–36.
- Widianto, F., & Nasution, M. A. (2022). *Pengaruh Perilaku Konsumen dan Perubahan Pasar Terhadap Tingkat Penjualan Wuling di PT Arista Jaya Lestari Cabang Sm Raja Medan*. Journal Economic Management and Business, 1(2), 169–175.
- Rizai, Y. (2024). *Evaluasi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias* (Skripsi, Universitas Nias).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12/SE/XI/2014 tentang Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran).

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik